

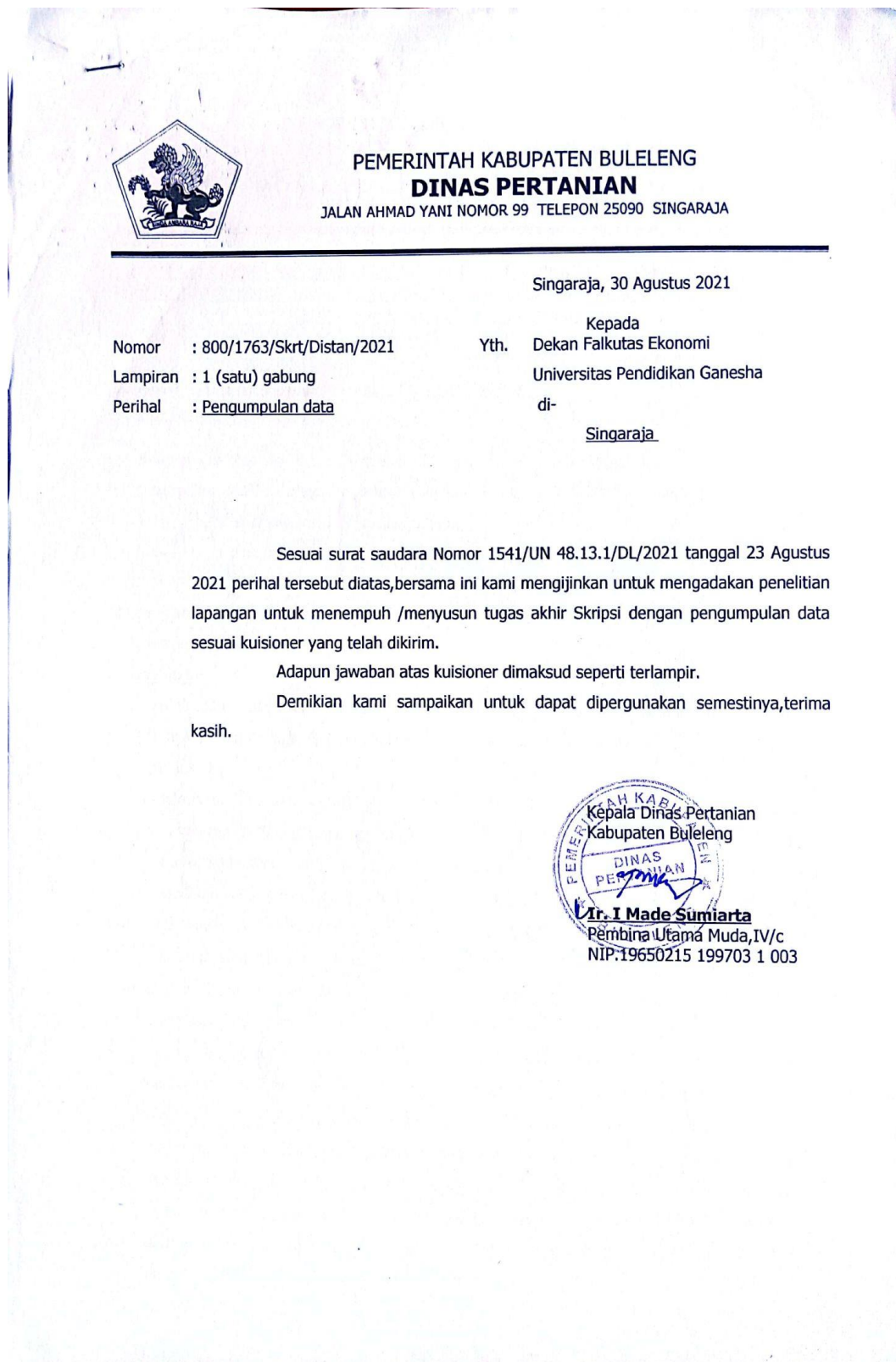
Lampiran 01 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya peningkatan produksi, mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian	Meningkatnya produksi dan produktivitas Pertanian.	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	2,50	2,50	2,70	3,00	3,00
			1.Produktivitas Padi (kw/ha)	56,68	56,82	56,97	57,11	57,25
			2.Produksi Palawija (ton)	43.385	44.252	45.137	46.040	46.961
			3.Produksi Hortikultura (ton)	124.389	127.499	130.941	134.869	138.915
			4.Produksi Perkebunan (ton)	15.319	15.701	16.125	16.609	17.107
			5.Produksi Daging (ton)	8.127	8.830	8.555	8.812	9.076
			6.Populasi Sapi (ekor)	126.066	126.696	127.329	127.965	128.604
			7.Jumlah Penyakit Ternak (kasus)	33	26	21	17	13
		8.Cakupan bina kelompok petani (%)	55	60	65	70	75	
		Meningkatnya mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian	Persentase peningkatan kelompok pelaku usaha bidang pertanian (%)	20	40	60	80	100
			1. Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha bidang pertanian komoditas tanaman pangan	5	10	15	20	25
			2. Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha bidang pertanian komoditas hortikultura	5	10	15	20	25
			3. Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha bidang pertanian komoditas perkebunan	5	10	15	20	25
			4. Jumlah peningkatan kelompok pelaku usaha bidang pertanian	5	10	15	20	25

		komoditas peternakan						
		Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (petani)	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (%)	38,50	39,40	40,30	41,20	42,10
			Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	767	785	803	821	839



Lampiran 02 Hasil Wawancara





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN
 JALAN AHMAD YANI NOMOR 99 SINGARAJA, TELP/FAX. (0362) 25090
 e-mail:distan@bulelengkab.go.id, website: www.distan.bulelengkab.go.id

JAWABAN HASIL WAWANCARA ANTARA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG DEGAN GEDE WIRA ANGGAJAYA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNDIKSA, SELASA, 14 SEPTEMBER 2021

1. Apa Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng ?

Jawab :

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab. Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut:

Visi : Meningkatkan nilai produk pertanian

Misi : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah

2. Bagaimana Bapak memotivasi pegawai agar bekerja sesuai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

a. Salah satu strategi atau cara untuk memotivasi pegawai agar tercapai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng adalah dengan cara memberikan motivasi finansial dan non finansial.

- Motivasi finansial merupakan bentuk pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atau pegawai secara langsung dalam bentuk gaji yang sifatnya tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap, baik dihitung bulanan atau tahunan.

- Sedangkan motivasi Non finansial merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, berupa uang tunjangan penghasilan (TPP), uang lembur, uang perjalanan ataupun penghargaan.

b. Kepala Dinas Pertanian Buleleng memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi dan berkreatifitas dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pencapaian visi misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng dan menuangkan dalam bentuk kegiatan - kegiatan inovatif dalam rangka membuat terobosan- terobosan dalam peningkatan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, contoh kegiatan lomba membuat video dan konten menarik terkait budidaya tertentu disector pertanian, dan hasilnya inovasi tersebut dapat digetoktulkan serta dikembangkan oleh para petani buleleng, sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat serta pemenang lomba diberikan hadiah yang menarik.

3. Apakah Pegawai sudah bekerja sesuai dengan visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

Sudah, hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP), bahwa seluruh Pegawai ASN yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah melakukan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan ditempatkan pada masing- masing bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing – masing pegawai tersebut dan dapat melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

4. Sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan, Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki tujuan jangka Pendek ?

Jawab :

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Pendek yang sering juga disebut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJP yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masig OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Pendek dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renja (Rencana Kerja) Tahunan, yang mana penyusunannya di susun setiap tahun.

5. Apa saja program-program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
12. Program peningkatan produksi hasil peternakan
13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
14. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
16. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
17. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

6. Apakah Pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng memiliki Tujuan Jangka Menengah ?

Jawab :

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka menengah yang sering juga disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJMD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Menengah dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renstra (Rencana Strategis) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

7. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Menengah tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut yaitu :

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut: **"TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN"**.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk periode 2017-2022, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatnya mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (petani)

8. Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki Tujuan Jangka Panjang ?

Jawab :

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Panjang yang sering juga disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Dalam Penjabaran RPJPD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Panjang dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan : IKU (Indikator Kinerja Utama) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017-2022).

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan daerah, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan dan ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

9. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Panjang tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
2. Persentase peningkatan kelompok pelaku usahabidang pertanian
3. Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

10. Bagaimana Strategi Bapak untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun Strategi untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi intern SDM dan budaya organisasi yang didukung kapabilitas dan gaya kepemimpinan yang demokratis untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sector pertanian yang prima.
2. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kinerja organisasi
3. Meningkatkan kompetensi SDM dengan dukungan teknologi informasi yang komprehensif dan online untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

11. Kebijakan apa saja yang bapak buat untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah menerapkan sistem absen online (G-Absen) dan G-Kinerja dan apabila ada pegawai yang

- tidak disiplin dan terlambat kerja maka sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin dalam tugas adalah berupa pemotongan tunjangan kinerja .
2. Upaya peningkatan kinerja kepada pegawai, berdasarkan mutu pelayanan kepada para Petani sehingga pelayanan yang dilakukan di Dinas Pertanian sebagai tolak ukur yang baik.
 3. Program atau tugas pokok yang dilakukan pegawai bahkan proses pelaksanaan program dapat dijalankan dengan baik, antara lain pelaksanaan program didalam maupun diluar gedung Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
 4. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sector pertanian yaitu waktu pekerjaan mampu mempertanggungjawabkan sebagai pegawai sehingga dalam proses pekerjaan semua ada tupoksinya masing-masing.

12. Apakah ada kendala yang bapak hadapi dalam mencapai capaian kinerja yang optimal ?

Jawab :

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja yang optimal yaitu :

a. **Kendala Core Bussiness :**

1. Belum Optimalnya Produktivitas/Produksi Pertanian
2. Lemahnya daya saing dan mutu Produk Pertanian
3. SDM Petani rendah

b. **Kendala capaian kinerja :**

1. Pelaksanaan kegiatan Tidak tepat waktu sebagaimana yang telah dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan yang sudah ditetapkan dikarenakan menunggu musim tanam.
2. Jumlah Sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dua fungsi sekaligus yakni sebagai aparatur pengawas dan menjadi pelaksana kegiatan tidaklah cukup tersedia.
3. Aparatur pengawas yang notabene sebagai pejabat fungsional belum sepenuhnya memahami fungsi sebagai pemberi peringatan dini dan memberikan jasa konsultasi.

13. Bagaimana cara bapak meghadapi kendala tersebut ?

Jawab :

Adapun cara untuk mengahdapi kendala tersebut adalah :

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 maka kebijakan yang dipakai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dalam pelaksanaan program /kegiatan guna tercapainya kelancaran kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Pertanian adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan, penerapan GAP/SOP, peningkatan kualitas SDM Pertanian, pengendalian OPT dan peningkatan status kesehatan hewan;

2. Pemberdayaan kelembagaan petani, peningkatan diversifikasi pangan dan pengolahan hasil;
3. Peningkatan SDM Pertanian;
4. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan;
5. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

14. Apakah ada penghargaan untuk pegawai yang telah mencapai capaian kinerja yang optimal ?

Jawab :

Ada, yaitu :

1. Secara financial pegawai disiplin diberikan Tunjangan penghasilan secara penuh tanpa ada komponen potongan dari disiplin absensi dan pegisian G-kinerja.
2. Pegawai ASN yang inovatif diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan dari pimpinan pengampu.
3. Pegawai ASN yang telah mencapai kinerja dengan baik akan diberikan prioritas utama dalam Promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi (Jabatan Struktural maupun Fungsional) sepanjang memenuhi syarat administrasi Pangkat dan Golongannya.

15. Apakah sanksi untuk pegawai yang memiliki capaian kinerja yang belum mencapai target ?

Jawab :

1. Secara financial pegawai yang kurang disiplin maka Tunjangan penghasilannya tidak dibayar secara penuh.
2. Tidak ada Promosi Jabatan

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng



Jr. I Made Sumiarta
NIP. 19650215 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN
 JALAN AHMAD YANI NOMOR 99 SINGARAJA, TELP/FAX. (0362) 25090
 e-mail: distan@bulelengkab.go.id, website: www.distan.bulelengkab.go.id

JAWABAN HASIL WAWANCARA KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIN DINAS
 PERTANIAN KABUPATEN BULELENG DEGAN GEDE WIRA ANGGAJAYA MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI UNDIKSA, SELASA, 14 SEPTEMBER 2021

1. Apa Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng ?

Jawab :

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab. Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut:

Visi : Meningkatnya nilai produk pertanian

Misi : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah

2. Bagaimana cara pimpinan memotivasi staf agar bekerja sesuai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

a. Salah satu strategi atau cara pimpinan untuk memotivasi staf agar tercapai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng adalah dengan cara memberikan motivasi finansial dan non finansial.

- Motivasi finansial merupakan bentuk pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atau pegawai secara langsung dalam bentuk gaji yang sifatnya tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap, baik dihitung bulanan atau tahunan.

- Sedangkan motivasi Non finansial merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, berupa uang tunjangan penghasilan (TPP), uang lembur, uang perjalanan ataupun penghargaan.

b. Kepala Dinas Pertanian Buleleng memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi dan berkreaitifitas dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pencapaian visi misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng dan menuangkan dalam bentuk kegiatan - kegiatan inovatif dalam rangka membuat terobosan- terobosan dalam peningkatan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, contoh kegiatan lomba membuat video dan konten menarik terkait budidaya tertentu disector pertanian, dan hasilnya inovasi tersebut dapat digetoktulkan serta dikembangkan oleh para petani buleleng, sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat serta pemenang lomba diberikan hadiah yang menarik.

3. Bagaimana cara bapak/ibu mengimplementasikan visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

Dengan cara mendukung dan melaksanakan program – program yang telah ditetapkan dalam, Renja, Renstra dan IKU, dengan tepat waktu dan akuntabilitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan ditempatkan oleh pimpinan pada masing- masing bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki.

4. Sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan, Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki tujuan jangka Pendek ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka pendek, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Pendek yang sering juga disebut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJP yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Pendek dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renja (Rencana Kerja) Tahunan, yang mana penyusunannya di susun setiap tahun.

5. Apa saja program-program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

12. Program peningkatan produksi hasil peternakan
13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
14. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
16. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
17. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

6. Apakah Pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng memiliki Tujuan Jangka Menengah ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka menengah yang sering juga disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJMD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Menengah dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renstra (Rencana Strategis) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

7. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Menengah tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut yaitu :

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”**.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk periode 2017-2022, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatnya mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (petani)

8. Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki Tujuan Jangka Panjang ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka panjang, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Panjang yang sering juga disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Dalam Penjabaran RPJPD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masig OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Panjang dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan : IKU (Indikator Kinerja Utama) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan daerah, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan dan ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Sedangkan tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

9. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Panjang tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
2. Persentase peningkatan kelompok pelaku usahabidang pertanian
3. Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

10. Bagaimana Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi intern SDM dan budaya organisasi yang didukung kapabilitas dan gaya kepemimpinan yang demokratis untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sector pertanian yang prima.
2. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kinerja organisasi
3. Meningkatkan kompetensi SDM dengan dukungan teknologi informasi yang komprehensif dan online untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

11. Kebijakan apa saja yang Pimpinan buat untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun kebijakan yang dibuat oleh pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah menerapkan sistem absen online (G-Absen) dan G-Kinerja dan apabila ada pegawai yang

tidak disiplin dan terlambat kerja maka sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin dalam tugas adalah berupa pemotongan tunjangan kinerja .

2. Upaya peningkatan kinerja kepada pegawai, berdasarkan mutu pelayanan kepada para Petani sehingga pelayanan yang dilakukan di Dinas Pertanian sebagai tolak ukur yang baik.
3. Program atau tugas pokok yang dilakukan pegawai bahkan proses pelaksanaan program dapat dijalankan dengan baik, antara lain pelaksanaan program didalam maupun diluar gedung Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
4. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sector pertanian yaitu waktu pekerjaan mampu mempertanggungjawabkan sebagai pegawai sehingga dalam proses pekerjaan semua ada tupoksinya masing-masing.

12. Apakah ada penghargaan untuk pegawai yang telah mencapai capaian kinerja yang optimal ?

Jawab :

Ada, yaitu :

1. Secara financial pegawai disiplin diberikan Tunjangan penghasilan secara penuh tanpa ada komponen potongan dari disipin absensi dan pegisian G-kinerja.
2. Pegawai ASN yang inovatif diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan dari pimpinan pengampu.
3. Pegawai ASN yang telah mencapai kinerja dengan baik akan diberikan prioritas utama dalam Promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi (Jabatan Struktural maupun Fungsional) sepanjang memenuhi syarat administrasi Pangkat dan Golongannya.

13. Apakah sanksi untuk pegawai yang memiliki capaian kinerja yang belum mencapai target ?

Jawab :

1. Secara financial pegawai yang kurang disiplin maka Tunjangan penghasilannya tidak dibayar secara penuh.
2. Tidak ada Promosi Jabatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Pertanian
Kabupaten Buleleng



Desak Nyoman Arnini, SE
NIP. 19680522 200604 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN
 JALAN AHMAD YANI NOMOR 99 SINGARAJA, TELP/FAX. (0362) 25090
 e-mail: distan@bulelengkab.go.id, website: www.distan.bulelengkab.go.id

JAWABAN HASIL WAWANCARA STAF UMUM DAN KEPEGAWAIN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULELENG DEGAN GEDE WIRA ANGGAJAYA MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI UNDIKSA, SELASA, 14 SEPTEMBER 2021

1. Apa Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng ?

Jawab :

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab. Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut:

Visi : Meningkatnya nilai produk pertanian

Misi : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah

2. Bagaimana cara pimpinan memotivasi staf agar bekerja sesuai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

- a. Salah satu strategi atau cara pimpinan untuk memotivasi staf agar tercapai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng adalah dengan cara memberikan motivasi finansial dan non finansial.
 - Motivasi finansial merupakan bentuk pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atau pegawai secara langsung dalam bentuk gaji yang sifatnya tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap, baik dihitung bulanan atau tahunan.
 - Sedangkan motivasi Non finansial merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, berupa uang tunjangan penghasilan (TPP), uang lembur, uang perjalanan ataupun penghargaan.
- b. Kepala Dinas Pertanian Buleleng memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi dan berkreatifitas dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pencapaian visi misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng dan menuangkan dalam bentuk kegiatan - kegiatan inovatif dalam rangka membuat terobosan- terobosan dalam peningkatan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, contoh kegiatan lomba membuat video dan konten menarik terkait budidaya tertentu disector pertanian, dan hasilnya inovasi tersebut dapat digetoktulkarkan serta dikembangkan oleh para petani buleleng, sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat serta pemenang lomba diberikan hadiah yang menarik.

3. Bagaimana cara bapak/ibu mengimplementasikan visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

Dengan cara mendukung dan melaksanakan program – program yang telah ditetapkan dalam, Renja, Renstra dan IKU, dengan tepat waktu dan akuntabilitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan ditempatkan oleh pimpinan pada masing- masing bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki.

4. Sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan, Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki tujuan jangka Pendek ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka pendek, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Pendek yang sering juga disebut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJP yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Pendek dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renja (Rencana Kerja) Tahunan, yang mana penyusunannya di susun setiap tahun.

5. Apa saja program-program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

12. Program peningkatan produksi hasil peternakan
13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
14. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
16. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
17. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

6. Apakah Pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng memiliki Tujuan Jangka Menengah ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka menengah yang sering juga disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJMD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Menengah dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renstra (Rencana Strategis) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

7. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Menengah tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut yaitu :

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”**.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk periode 2017-2022, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatnya mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (petani)

8. Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki Tujuan Jangka Panjang ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka panjang, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Panjang yang sering juga disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Dalam Penjabaran RPJPD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masig OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Panjang dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan : IKU (Indikator Kinerja Utama) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan daerah, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan dan ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

9. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Panjang tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
2. Persentase peningkatan kelompok pelaku usahabidang pertanian
3. Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

10. Bagaimana Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi intern SDM dan budaya organisasi yang didukung kapabilitas dan gaya kepemimpinan yang demokratis untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sector pertanian yang prima.
2. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kinerja organisasi
3. Meningkatkan kompetensi SDM dengan dukungan teknologi informasi yang komprehensif dan online untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

11. Kebijakan apa saja yang Pimpinan buat untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun kebijakan yang dibuat oleh pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah menerapkan sistem absen online (G-Absen) dan G-Kinerja dan apabila ada pegawai yang

- tidak disiplin dan terlambat kerja maka sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin dalam tugas adalah berupa pemotongan tunjangan kinerja .
2. Upaya peningkatan kinerja kepada pegawai, berdasarkan mutu pelayanan kepada para Petani sehingga pelayanan yang dilakukan di Dinas Pertanian sebagai tolak ukur yang baik.
 3. Program atau tugas pokok yang dilakukan pegawai bahkan proses pelaksanaan program dapat dijalankan dengan baik, antara lain pelaksanaan program didalam maupun diluar gedung Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
 4. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sector pertanian yaitu waktu pekerjaan mampu mempertanggungjawabkan sebagai pegawai sehingga dalam proses pekerjaan semua ada tupoksinya masing-masing.

12. Apakah ada penghargaan untuk pegawai yang telah mencapai capaian kinerja yang optimal ?

Jawab :

Ada, yaitu :

1. Secara financial pegawai disiplin diberikan Tunjangan penghasilan secara penuh tanpa ada komponen potongan dari disipin absensi dan pegisian G-kinerja.
2. Pegawai ASN yang inovatif diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan dari pimpinan pengampu.
3. Pegawai ASN yang telah mencapai kinerja dengan baik akan diberikan prioritas utama dalam Promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi (Jabatan Struktural maupun Fungsional) sepanjang memenuhi syarat administrasi Pangkat dan Golongannya.

13. Apakah sanksi untuk pegawai yang memiliki capaian kinerja yang belum mencapai target ?

Jawab :

1. Secara financial pegawai yang kurang disiplin maka Tunjangan penghasilannya tidak dibayar secara penuh.
2. Tidak ada Promosi Jabatan

Staf Umum dan Kepegawaian Dinas
Pertanian
Kabupaten Buleleng


Ida Ayu Sri Utami Dewi
NIP. 19750606 200801 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN
 JALAN AHMAD YANI NOMOR 99 SINGARAJA, TELP/FAX. (0362) 25090
 e-mail: distan@bulelengkab.go.id, website: www.distan.bulelengkab.go.id

JAWABAN HASIL WAWANCARA KASUBAG PERENCANAAN DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN BULELENG DEGAN GEDE WIRA ANGGAJAYA MAHASISWA FAKULTAS
 EKONOMI UNDIKSA, SELASA, 14 SEPTEMBER 2021

1. Apa Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng ?

Jawab :

Adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kab. Buleleng dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-2 Bupati terpilih Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut:

Visi : Meningkatnya nilai produk pertanian

Misi : Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah

2. Bagaimana cara pimpinan memotivasi staf agar bekerja sesuai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

a. Salah satu strategi atau cara pimpinan untuk memotivasi staf agar tercapai visi dan misi pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng adalah dengan cara memberikan motivasi finansial dan non finansial.

- Motivasi finansial merupakan bentuk pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atau pegawai secara langsung dalam bentuk gaji yang sifatnya tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap, baik dihitung bulanan atau tahunan.

- Sedangkan motivasi Non finansial merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, berupa uang tunjangan penghasilan (TPP), uang lembur, uang perjalanan ataupun penghargaan.

b. Kepala Dinas Pertanian Buleleng memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinovasi dan berkreatifitas dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pencapaian visi misi Dinas Pertanian Kab.Buleleng dan menuangkan dalam bentuk kegiatan - kegiatan inovatif dalam rangka membuat terobosan- terobosan dalam peningkatan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, contoh kegiatan lomba membuat video dan konten menarik terkait budidaya tertentu disector pertanian, dan hasilnya inovasi tersebut dapat digetoktulkarkan serta dikembangkan oleh para petani buleleng, sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat serta pemenang lomba diberikan hadiah yang menarik.

3. Bagaimana cara bapak/ibu mengimplementasikan visi dan misi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ?

Jawab :

Dengan cara mendukung dan melaksanakan program – program yang telah ditetapkan dalam, Renja, Renstra dan IKU, dengan tepat waktu dan akuntabilitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan ditempatkan oleh pimpinan pada masing- masing bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki.

4. Sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan, Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki tujuan jangka Pendek ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka pendek, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Pendek yang sering juga disebut RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJP yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Pendek dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renja (Rencana Kerja) Tahunan, yang mana penyusunannya di susun setiap tahun.

5. Apa saja program-program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

12. Program peningkatan produksi hasil peternakan
13. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
14. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
15. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
16. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
17. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

6. Apakah Pada Dinas Pertanian Kab. Buleleng memiliki Tujuan Jangka Menengah ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka menengah yang sering juga disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Dalam Penjabaran RPJMD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Menengah dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan Renstra (Rencana Strategis) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

7. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Menengah tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut yaitu :

Sesuai dengan Tujuan pada masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU, DAYA SAING DAN PEMASARAN KOMODITAS PERTANIAN”**.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai Tupoksi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk periode 2017-2022, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Meningkatnya mutu, daya saing dan pemasaran komoditas pertanian

3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (petani)

8. Apakah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng memiliki Tujuan Jangka Panjang ?

Jawab :

Ya,... memiliki tujuan jangka panjang. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Tujuan Jangka Panjang yang sering juga disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sesuai dengan amanat Undang – undang nomor : 25 tahun 2004, tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) tentang kewajiban Perangkat Daerah dalam Penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Dalam Penjabaran RPJPD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya masing masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menuangkan Tujuan Jangka Panjang dan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menuangkan Kebijakan yang disebut dengan : IKU (Indikator Kinerja Utama) yang mana penyusunannya di susun setiap 5 tahun (2017- 2022).

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan daerah, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan dan ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

9. Apa saja Program-program untuk mencapai tujuan jangka Panjang tersebut ?

Jawab :

Adapun Program -program untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut yaitu :

1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
2. Persentase peningkatan kelompok pelaku usahabidang pertanian
3. Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

10. Bagaimana Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun Strategi Pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi intern SDM dan budaya organisasi yang didukung kapabilitas dan gaya kepemimpinan yang demokratis untuk mewujudkan pelayanan masyarakat sector pertanian yang prima.
2. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kinerja organisasi
3. Meningkatkan kompetensi SDM dengan dukungan teknologi informasi yang komprehensif dan online untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

11. Kebijakan apa saja yang Pimpinan buat untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai ?

Jawab :

Adapun kebijakan yang dibuat oleh pimpinan untuk meningkatkan capaian kinerja pegawai yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah menerapkan sistem absen online (G-Absen) dan G-Kinerja dan apabila ada pegawai yang

- tidak disiplin dan terlambat kerja maka sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin dalam tugas adalah berupa pemotongan tunjangan kinerja .
2. Upaya peningkatan kinerja kepada pegawai, berdasarkan mutu pelayanan kepada para Petani sehingga pelayanan yang dilakukan di Dinas Pertanian sebagai tolak ukur yang baik.
 3. Program atau tugas pokok yang dilakukan pegawai bahkan proses pelaksanaan program dapat dijalankan dengan baik, antara lain pelaksanaan program didalam maupun diluar gedung Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
 4. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sector pertanian yaitu waktu pekerjaan mampu mempertanggungjawabkan sebagai pegawai sehingga dalam proses pekerjaan semua ada tupoksinya masing-masing.

12. Apakah ada penghargaan untuk pegawai yang telah mencapai capaian kinerja yang optimal ?

Jawab :

Ada, yaitu :

1. Secara financial pegawai disiplin diberikan Tunjangan penghasilan secara penuh tanpa ada komponen potongan dari disipin absensi dan pegisian G-kinerja.
2. Pegawai ASN yang inovatif diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan dari pimpinan pengampu.
3. Pegawai ASN yang telah mencapai kinerja dengan baik akan diberikan prioritas utama dalam Promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi (Jabatan Struktural maupun Fungsional) sepanjang memenuhi syarat administrasi Pangkat dan Golongannya.

13. Apakah sanksi untuk pegawai yang memiliki capaian kinerja yang belum mencapai target ?

Jawab :

1. Secara financial pegawai yang kurang disiplin maka Tunjangan penghasilannya tidak dibayar secara penuh.
2. Tidak ada Promosi Jabatan

Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng



Made Sutarman, SE.,MAP
NIP. 1974/604 200604 1 019

Hasil wawancara dengan Akademisi pertanian astas nama bapak I Putu Parmila, S.P, M. Si selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti.

1. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan visi misinya dengan baik?

Jawaban:

Saya rasa sudah ya karena sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat strategis terutama di Kabupaten Buleleng mengingat Kabupaten Buleleng mengingat sebagian besar wilayahnya adalah sesuai untuk pengembangan pertanian apalagi di masa ini hanya pertanian satu-satunya yang memberikan surplus bagi kegiatan perekonomian.

2. Dari tujuan yang telah disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, apakah tujuan-tujuan tersebut sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Kalau tingkat pelaksanaannya karena tidak dilakukan oleh Dinas Pertanian saja ada juga beberapa kegiatan-kegiatannya yang memerlukan stakeholder lainnya, sehingga secara prinsip Dinas Pertanian sudah melakukan tujuan-tujuan tersebut. Namun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi eksternal dan juga kondisi kondisi internal yang ada. Sekarang yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya di era sekarang banyak sekali terjadi berbagai kendala seperti salah satunya pandemi kedua itu adalah terjadinya alih fungsi lahan yang cukup masif akibat pertambahan jumlah penduduk dan tujuan ini juga belum maksimal tercapai karena tingkat usia petani pada umumnya itu rata-rata sudah berumur 55 sampai 70 tahun malah, nah ini tentunya menjadi salah satu penghalang tujuan namun dengan keterpaduan stakeholder dan juga kinerja masing-masing bidang yang ada di dinas pertanian sudah melakukan pendekatan pendekatan kelembagaan pendekatan individual dan juga melalui insentif-insentif yang sudah diimplementasikan oleh dinas pertanian.

3. Apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Ini sebenarnya menjadi keniscayaanya, ketika kita menetapkan tujuan dengan sasaran yang dituju itu memang harus realistis, tetapi masih dalam proses sehingga harus ada indikator-indikator yang harus dikembangkan oleh beberapa stakeholder baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan ini. Tentunya melalui tahapan-tahapan strategi kebersamaan yang jelas sehingga ini belum bisa dilihat secara parsial. Dalam dekade-dekade tertentu ini memang harus diperlukan evaluasi agar bisa dilaksanakan sehingga sasaran ini bisa paham dan secara transparan bisa dijadikan bahan dasar penyusunan program lebihlanjut. Misalkan berapa berapa persen sudah tercapai tujuannya dan berapa persen yang harus revisi dan persen yang harus disempurnakan. Nah inilah yang menjadi patokan kita ke depan baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, baik dari kita akademisi ini memang harus bisa juga memberikan bantuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan ini. Nah itu yang dapat saya jelaskan.

4. Bagaimana menurut bapak mengenai strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Untuk meningkatkan kesejahteraan itu memang sudah terarah dan yang disadari strategi ini betul-betul harus dilakukan dengan analisis yang jelas tahu persoalannya, potensi masalahnya dan strategi ini memang harus mampu menjawab solusi masalah yang dihadapi masyarakat sekarang terkait alih fungsi lahan, terus anak-anak mudanya itu sudah tidak lagi terlalu tertarik terhadap dunia pertanian, terus anjloknya harga-harga, serangan penyakit dan juga lemahnya penanganan pascapanen menjadi titik balik dari pada kegiatan pertanian kitanya. Contohnya Buleleng itu kan hortikultura tanaman-tanaman pertaniannya cukup lumayan bagus yang potensinya tinggi banyak potensi lokal atau seperti mangga legong yang sudah sedikit dan langka ini bisa digarap dengan strategi khusus maka Buleleng itu akan bangkit pasca hancurnya jeruk. Jadi yang masih bisa bertahan itu anggur tapi masalahnya adalah masih input tinggi dengan harga yang tidak terjamin. Ini strategi-strategi yang mungkin perlu kedepan walaupun ini sudah tercapai sudah dilaksanakan tetapi sekali lagi pertanian itulah sektor dinamis yang beresiko. Nah inilah yang perlu penguatan kelembagaan dalam mengatur strategi penguatan kelembagaan membuat pemodelan membuat trail ya dan tentunya

dengan kekuatan ekonomi kita harus bisa menjamin untuk mensubsidi harga dari produk yang akan mungkin itu dengan strateginya.

5. Apakah strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Strateginya sudah cukup baik ya, seperti beberapa contoh sudah bisa dibuktikan seperti bagaimana peran dalam pelaksanaan pertanian organik, bagaimana dalam pelayanan terhadap petani-petani atau kelompok-kelompok tani. Strategi yang diterapkan sudah sesuai, namun perlu dikembangkan melalui kreatifitas strategi-strategi lain ya atau berpikir out of the box karena kita berhadapan dengan pertanian yang sangat dinamis, sehingga kita tidak bisa pungkiri dinamisnya itu karena akibat dari proses alam. Kebijakan global ini memang perlu strategi khusus untuk hal-hal khusus salah satunya mungkin kebijakan yang sudah dilakukan adalah membuat trail-trail, meningkatkan kinerja sumber daya internalnya ya terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan ini sudah mulai menggandeng beberapa LSM seperti beberapa pemerhati pertanian seperti muda keren ini sudah mulai digandeng sehingga strategi pemodelan pertanian menginisiasi anak muda untuk pribadi pertanian.

6. Apakah perlu adanya evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Kalau berbicara perlu mestinya lebih ekstrim, evaluasi itu harus karena apa, karena tanpa evaluasi maka tidak akan tahu target yang dicapai apakah strateginya efektif atau tidak, kemudian dampaknya terhadap sasaran bagaimana, terhadap perkembangan perekonomian lokal atau regional ya ini kan tidak tahu, makanya saya harapkan ini tidak perlu tetapi harus. Keharusan ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama sehingga evaluasi bisa dilakukan secara internal dan eksternal baik melibatkan masyarakat dan kelompok, sehingga masukan-masukan ini menjadi penguat dinas di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi inilah satu-satunya yang kita punya mudah-mudahan dengan evaluasi ini kita semua berbesar hati untuk memajukan pertanian di Buleleng yang mempunyai potensi luar biasa. Untuk kedepan mudah-mudahan strategi ini dapat terintegrasi dengan agrowisata yang sudah

ada karena ini satu-satunya harapan kita. Pertanian agrowisata itu praktis kita akan berbicara peningkatan perekonomian di Kabupaten Buleleng dan juga secara regional di Provinsi Bali, karena sektor sektor lain seperti industri manufaktur sepertinya kita sudah memiliki harapan yang kecil, ini ditambah juga kenapa strategi ini penting dan evaluasi juga penting, mudah-mudahan kedepan setelah adanya bandara sehingga ini bisa mempercepat proses ekspansi hasil-hasil pertanian kita ke daerah-daerah lain malah kalau bisa sampai ke luar negeri terutama hortikulturanya seperti rambutan, durian, manggis dan buah-buahan beriklim rendah seperti yang ada di Bedugul, sayur-sayuran kalau kita hitung satu-persatu sangat luar biasa potensinya. Tetapi kenapa potensi yang besar dengan peningkatan perekonomian yang besar ini kenapa anak-anak muda sekarang malah tidak tertarik, inilah yang harus dijawab dengan strategi dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

7. Apakah arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para petani?

Jawaban:

Jadi arah kebijakan sebagian sudah dapat menyelesaikan masalah karena Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng intens dan seperti yang saya katakan tadi strategi pendekatannya sudah sesuai dengan kultur masyarakat Buleleng dengan potensi pengembangan pertanian di Buleleng tentunya. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah sangat memahami bagaimana karakter sosialnya, bagaimana kultur di Kabupaten Buleleng, mengenai potensi iklimnya, bagaimana potensi plasma nutfahnya ini tentunya sudah menjadi kajian-kajian sehingga berdasarkan kajian inilah arah kebijakannya sudah bisa beberapa menyelesaikan masalah. Tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah secara frontal atau secara total karena perlu waktu, sumber daya yang memadai, perlu teknologi, perlu arus modal dan perlu komitmen stakeholder lain karena pertanian tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai target targetnya, perlu dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dengan kelompok-kelompok dan masih banyak sekali. Nah inilah menariknya kita berbicara pertanian jadi kita tidak parsial yang hanya berbicara Dinas Pertanian. Mudah-mudahan stakeholder dapat mendukung dan tidak ada lagi kekakuan diantara instansi tertentu, sama-sama menjalankan target sehingga bisa tercapai agar bisa menutupi semua kelemahan kita. Secara birokrasi dapat dimudahkan, pelayanan dapat ditingkatkan, kerjasama dengan dengan instansi lain, dengan pihak swasta juga dengan LSM kita bergandeng tangan, maka saya yakin Buleleng akan cepat bangkit kuat dan sasaran utama mensejahterakan masyarakat secara ekonomi

sebagai pointer. Apa pun yang kita lakukan ujung-ujungnya pasti untuk kesejahteraan ekonomi baik dalam ekonomi lokal maupun ekonomi global. Maka dari itu sebagai saran saya, arah kebijakan nantinya lebih transparan, kemudian tidak ada hentinya untuk kordinasi dan tidak terjadi penyalahgunaan apa pun seperti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana dan lain sebagainya. Ini juga menjadi faktor-faktor atau catatan-catatan yang harus dihindari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Panji Sakti yang sangat mempunyai perhatian terhadap kebijakan dan juga perkembangan pertanian di Kabupaten Buleleng.

Hasil wawancara dengan petani atas nama Gede Suparta dari Jinangdalem.

8. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan visi misinya dengan baik?

Jawaban:

Dinas pertanian Kabupaten Buleleng memiliki visi dan misi yang sangat bagus untuk kemajuan pertanian, pelaksanaannya juga sudah cukup baik.

9. Dari tujuan yang telah disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, apakah tujuan-tujuan tersebut sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah dijalankan dengan baik, seperti salah satunya meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian.

10. Apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Untuk sasaran yang dituju dari tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah mengarah dengan cukup baik, seperti meningkatnya hasil pertanian di daerah Buleleng

11. Bagaimana menurut bapak mengenai strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Sebenarnya strategi yang digunakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah cukup baik, tetapi masih perlu dikembangkan agar bisa mengatasi masalah seperti alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sehingga kami para petani perlahan mulai kehilangan pekerjaannya.

12. Apakah strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Untuk tingkat pelaksanaannya dari strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik, seperti salah satunya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan hasil pertanian.

13. Apakah perlu adanya evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Evaluasi itu sangat perlu, mengingat usia para petani sebagian besar 60 hingga 70 tahun ke atas, nah masalah ini harusnya bisa di atasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng agar memotivasi anak-anak muda agar memiliki minat dalam bidang pertanian. Sebenarnya tingkat perekonomian dalam bidang pertanian ini cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

14. Apakah arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para petani?

Jawaban:

Untuk arah kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah mampu mengatasi masalah yang dihadapi kami para petani namun belum secara total mungkin ini perlu waktu yang tidak sedikit ya. Saya harap Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mampu menyelesaikan masalah-masalah yang belum teratasi dan kami para petani pastinya akan membantu untuk meningkatkan perekonomian di bidang pertanian.

Hasil wawancara dengan klien subak atas nama Made Widana dari Panji.

15. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan visi misinya dengan baik?

Jawaban:

Sudah, sampai sekarang Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Sudah menjalankan visi dan misinya dengan baik.

16. Dari tujuan yang telah disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, apakah tujuan-tujuan tersebut sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Sekarang yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya di era sekarang banyak sekali terjadi berbagai kendala seperti salah satunya pandemi kedua itu adalah terjadinya alih fungsi lahan yang cukup masif akibat pertambahan jumlah penduduk dan tujuan ini juga belum maksimal tercapai karena tingkat usia petani”

17. Apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Dari tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, sudah mencapai sasaran yang di harapkan oleh petani, tetapi kami para petani berharap Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng kedepan bisa memberikan bantuan kegiatan-kegiatan yang bisa menutupi permasalahan yang dihadapi petani untuk mencapai hasil pertanian yang lebih maksimal.

18. Bagaimana menurut bapak mengenai strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Strategi yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah baik. Tetapi masih perlu perubahan untuk disesuaikan dengan strategi untuk menanggulangi masalah yang dihadapi petani.

19. Apakah strategi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sudah terlaksana dengan baik?

Jawaban:

Untuk strateginya terutama aturan yang dibuat masih perlu di perbaiki, seperti dalam menentukan harga pangan dan pemberian pupuk yang masih kurang tepat waktu.

20. Apakah perlu adanya evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng?

Jawaban:

Sangat perlu, agar Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng bisa merubah strateginya yang kurang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi petani.

21. Apakah arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para petani?

Jawaban:

Berdasarkan kebijakan yang dibuat Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, masih belum ada kegiatan seperti Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).



Lampiran 03 Dokumentasi



